

KOORDINASI DALAM PENDISTRIBUSIAN GAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Liny Octavia

(email : liny_octavia@yahoo.com)

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M. Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Negara-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The need for LPG gas, nowadays, being a very important needs in life, whether in the household or in the bisnis development. Besides decrease in economical, LPG also become one of these targets the government to replace the use of kerosene in society, namely by conversion program of kerosene to LPG 3 kg. for people who low levels of economic and micro businesses. Pekanbaru City, since in 2009, including the carrying out of the program. This distribution of LPG 3 kg gas requires a clear and explicit coordination. The purpose of this research is to find out how coordination in distributing gas LPG 3 kg in the city of Pekanbaru and to know what factors affect coordination in distributing gas LPG 3 kg.

In theory Hasibuan, there are 4 (four) indicator of coordination, namely: the division of work, discipline, communication and unity of action. Research method used in this research is research qualitative. With technique done; namely snowball sampling, to key informer on this research is dept. of industry and trade and Pertamina and informer appendages is agent LPG 3 kg. And this research result analysis and managed with techniques used.

Based on the research that has been conducted, the results of this study indicate that coordination in distributing gas LPG 3 kg has done is still not going well. There are some indicators that are still not walking by the unity which shows that there is coordination. Factors that affect coordination in distributing this is a managerial hierarchy in the distribution mechanisms, procedures and applicable rules and plan and purpose that have been made in the distribution of gas LPG 3 kg.

Keywords: *Coordination, Distribution, Liquefied Petroleum Gas*

PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat akan berhasil apabila diberikan stimular yang cukup dengan arah pembangunan yang jelas, seperti strategi pembangunan global harus diarahkan

dengan kebutuhan pokok masyarakat, seperti pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Pada saat sekarang, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dari sisi ekonomis, masyarakat cenderung menggunakan bahan-bahan yang lebih hemat dan ekonomis untuk kegiatan rumah tangga sehari-hari. Dalam hal ini,

kebutuhan akan gas LPG di masyarakat merupakan salah satu kebutuhan yang dianggap ekonomis dalam rumah tangga.

LPG adalah kependekan dari *Liquefied Petroleum Gas*. Dalam pelafalan Indonesia, sering disebut Elpiji. LPG merupakan hasil produksi dari kilang minyak atau kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propane (C_3H_8) dan butane (C_4H_{10}) yang dicairkan. LPG *butane* dan LPG *mix* biasanya dipergunakan oleh masyarakat umum untuk bahan bakar memasak, sedangkan LPG *propane* biasanya dipergunakan di industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya. Penggunaan Elpiji di Indonesia terutama adalah sebagai bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Selain sebagai bahan bakar alat dapur, Elpiji juga cukup banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor (walaupun mesin kendaraannya harus dimodifikasi terlebih dahulu)

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah Indonesia, maka dilaksanakan program konversi minyak tanah ke LPG. Program konversi minyak tanah ke LPG ini bermaksud untuk mengurangi anggaran APBN tentang minyak tanah menjadi separuhnya. Selain itu, program ini akan menguntungkan kilang minyak di Indonesia karena produk kerosene mempunyai nilai tambah (*added value*) sebagai bahan bakar avtur yang non subsidi. Sekaligus dapat meningkatkan produksi gas oil dan mengurangi ketergantungan impor gas oil. Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap dengan menghilangkan subsidi minyak tanah ke LPG.

Penggunaan gas LPG pada saat sekarang, setelah berjalannya program konversi tersebut, dinilai meningkat. Pada awalnya, LPG digunakan hanya untuk orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. Namun, sejak adanya program konversi tersebut, maka mampu menjangkau masyarakat ekonomi rendah sekalipun dengan adanya bantuan

subsidi pemerintah, yang lebih dikhususkan kepada gas LPG 3 kg.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan 5 Tahun 2011, LPG tabung 3kg atau LPG Tertentu merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. Pengguna LPG ini adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana LPG 3 kg sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Secara umum, Indonesia melakukan program konversi ini pada tahun 2007. Pekanbaru merupakan kota yang turut dalam melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas elpiji sejak tahun 2009. Gas LPG tersebut didistribusikan dari Aceh ke Pekanbaru. Pada awal program konversi, tahun 2009, gas tersebut awalnya diberikan secara gratis oleh pemerintah beserta kompor sederhana guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Dalam pendistribusian gas ini, adanya koordinasi yang dilakukan. Pertamina bertindak sebagai penyalur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bertindak sebagai penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan peraturan gubernur dan walikota yang digunakan. Dalam hal pengawasan pendistribusian ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ikut andil bersama-sama dengan pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi maupun satpol pp.

Pendistribusian gas LPG 3kg ini dilakukan dari Pertamina, kemudian menyalurkan kepada penyalur-penyalar yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian dari penyalur, selanjutnya didistribusikan ke sub penyalur atau pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di penyalur tersebut. Di Kota Pekanbaru sendiri, jumlah penyalur gas LPG 3kg tersebut berjumlah 12 penyalur, dan masing-masing penyalur

memiliki pangkalan rata-rata berjumlah 30 sub agen atau pangkalan.

Masalah yang peneliti temukan di lapangan, antara lain: banyaknya penjual gas LPG 3 kg yang tidak memiliki izin untuk menjual gas elpiji tersebut. Penjualan gas tersebut pun dilakukan di tempat yang bukan seharusnya, seperti di warung harian. Gas yang dijual di warung harian tersebut, terkadang banyak ditemukan penjualan dengan harga yang masih melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini dikarenakan pihak warung sebagai pihak ketiga membeli gas tersebut dari sub penyalur yang seharusnya merupakan pihak terakhir yang berhubungan langsung dengan konsumen. Sehingga harga yang ditawarkan pun tidak sesuai dengan harga eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Peringatan akan tidak diperbolehkannya menaikkan harga gas LPG 3 kg dari dinas sendiri pun masih dianggap angin lalu oleh penjual gas LPG 3 kg di warung-warung. Hal ini berkaitan dengan penyalur maupun sub penyalur yang masih saja memberikan izin penjualan terhadap warung-warung harian. Hal ini kurang ditegasi oleh pihak pengawas, Disperindag. Pemberian sanksi hanya sebatas peringatan dan peneguran oleh pihak Pertamina. Namun, untuk turun langsung, sanksi yang jelas belum ditemukan.

Apabila keadaan seperti ini terus saja dibiarkan, akan mengakibatkan masyarakat menengah ke bawah yang menjadi sasaran dari subsidi pemerintah ini sendiri pun, tidak mampu untuk membeli gas tersebut secara eceran.

Koordinasi yang efektif tergantung pada komunikasi yang efektif pula, seperti halnya pemberian informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, informasi tentang pelaksanaan tugas dan penjelasan tugas yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi tersebut. Kejelasan informasi dan tugas yang

dilakukan tersebut dapat diwujudkan dalam pertemuan melalui rapat koordinasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, penyalur, dan sub penyalur, baik secara intern maupun ekstern.

Dapat disadari bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi ini merupakan hal yang sangat membantu bagi masyarakat, terutama masyarakat yang keadaan ekonominya menengah ke bawah. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun, menggunakan gas ini lebih ekonomis dan lebih hemat, sehingga rumah tangga dan industri kecil pun bisa menjangkau penggunaan gas ini akibat subsidi dari pemerintah.

Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sinergisitas kerjasama antara Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas terkait dalam hal pelaksanaan peraturan mengenai sasaran penjualan gas LPG 3 kg yang masih sangat rendah sehingga masih banyak ditemukannya di lapangan, pihak-pihak yang tidak seharusnya menggunakan atau menikmati gas yang disubsidi, dalam hal ini bisa dikatakan salah sarasannya tujuan dari program konversi subsidi dari minyak tanah ke gas LPG 3 kg.
2. Kurangnya komunikasi yang tegas antara dinas terkait, Disperindag, Pertamina dan penyalur-penyulur dalam hal penentuan harga LPG 3 kg yang melampaui harga yang seharusnya atau HET. Sehingga, banyaknya masyarakat yang pada akhirnya membeli gas ini dengan harga yang sangat tinggi.
3. Penerapan sanksi yang tidak tegas oleh pihak-pihak berwenang dalam hal pemberlakuan harga dan izin penjualan. Sehingga, masih ditemukan di lapangan pihak-pihak yang masih saja menjual tanpa izin dan melebihi harga meskipun sudah ditegur berulang kali oleh dinas terkait

sekalipun. Dalam melaksanakan penertiban di lapangan, terkadang pihak dinas terkait tidak bisa mengambil tindakan langsung, karena tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana koordinasi dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara terutama yang berkaitan dengan koordinasi.
 2. Bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.
- b. Secara praktis
Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru serta instansi-instansi yang terkait, dalam koordinasi

pendistribusian LPG 3 kg di Kota Pekanbaru.

KONSEP TEORITIS

Rais dalam **Altensyah (2012 : 20)**, menyatakan bahwa koordinasi merupakan suatu usaha penyalarsan yang dilakukan oleh manajer atau administrator antara tugas yang dilakukan oleh tiap-tiap yang ada dalam suatu organisasi sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran antara tugas-tugas yang dilaksanakan dan tidak terjadi *double* pekerjaan.

Handoko (2003 : 196) juga menyebutkan bahwa derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Umumnya organisasi memiliki tipe yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. **Hasibuan (2011 : 86)** berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi.

Hasibuan (2006 : 88), berpendapat adapun langkah-langkah penting dalam koordinasi adalah sebagai berikut:

a) Pembagian Kerja

Secara teoritis, tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya

jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha untuk mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

b) Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

c) Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan. Dalam organisasi, komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.

d) Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya, koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan

individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu, hal ini dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada PT. Pertamina Kota Pekanbaru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Sales Representatif LPG V Riau PT. Pertamina dan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi *informan* pelengkap dalam penelitian ini adalah Staff Pegawai PT. Pertamina, agen LPG 3 Kg atau pangkalan LPG 3 kg.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah yakni data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan. Data primer ini dapat diperoleh dari Kepala Sales Representatif PT. Pertamina dan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Disperindag. Dan data sekunder yaitu data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yakni berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang di temukan di lapangan. Penyajian data dengan deskripsi, hasil wawancara dan observasi yang

nantinya akan dimasukkan ke dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian gas LPG 3 kg merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Dalam koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg dilibatkan beberapa pihak dan dibentuk tim monitoring yang ditunjuk oleh Walikota Pekanbaru.

Adapun pihak terkait dalam pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu Pertamina Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, agen LPG 3 kg, dan sub penyalur. Pihak-pihak tersebut harus memiliki kemampuan dalam mengerjakan tugas, memiliki tanggung jawab dan memiliki strategi dalam mengerjakan pekerjaannya. Dalam hal pendistribusian gas LPG ini diterapkan koordinasi yang baik, sehingga koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg ini akan penulis tinjau dari beberapa indikator, yaitu pembagian kerja, disiplin, komunikasi, dan kesatuan tindakan

1. Pembagian Kerja

Dalam koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg, sangat penting bagi pihak yang terkait untuk mengetahui tugas masing-masing dalam hal ini adanya pembagian tugas antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Pertamina Kota Pekanbaru serta adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Yang termasuk dalam hal ini adalah adanya rincian atau uraian tugas.

2. Disiplin

Dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat setiap individu, menyepakati aturan-aturan tertentu yang bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Disiplin terdapat aturan-aturan yang disepakati, merupakan sikap yang menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban. Begitupun pada pihak-pihak yang terkait pendistribusian gas LPG 3 kg. Terdapat disiplin dan aturan atau kebijakan yang disepakati bersama untuk mewujudkan keteraturan dalam proses koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg ini.

3. Komunikasi

Dalam pelaksanaan suatu koordinasi, sangatlah diperlukan suatu komunikasi yang lancar antara Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar terjalin suatu hubungan yang harmonis guna kelancaran pendistribusian gas LPG 3 kg sesuai dengan keinginan bersama dan tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi dapat membantu pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat. Dari komunikasi diharapkan kepada pihak-pihak yang melaksanakan pendistribusian gas LPG 3 kg mengerti dan memahami tujuan dari perencanaan yang telah dibuat. Dimana komunikasi merupakan alat untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait distribusi gas LPG 3 kg. Dengan adanya komunikasi ini diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dan kesamaan kerja yang dilakukan setiap anggota dan seluruh pihak terkait dengan pendistribusian gas LPG 3 kg ini.

4. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan bukan hanya kewajiban pimpinan dalam mengatur bawahannya saja. Namun, dalam koordinasi horizontal, kesatuan tindakan sangat dibutuhkan antara pihak-pihak yang terkait dalam suatu

koordinasi. Dalam pendistribusian gas LPG 3 kg ini, dibutuhkan kesatuan tindakan yang selaras sehingga tujuan dari pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah di rencanakan.

Kesatuan tindakan antara pihak-pihak terkait dalam pendistribusian gas ini merupakan kerja sama yang dibangun untuk bisa selaras mengerjakan setiap pekerjaan yang sudah diberikan kepada masing-masing pihak. Meskipun memiliki pekerjaan yang berbeda-beda di setiap instansi atau pihak yang terkait, namun perlu adanya kerjasama yang terbentuk sehingga tujuan dari pendistribusian ini bisa dilaksanakan dan sejalan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Hirarki Manajerial
Faktor yang sangat berpengaruh dalam koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg ini adalah hirarki manajerial. Aliran informasi serta pembagian tugas sangat bergantung dengan adanya hirarki manajerial dimana adanya yang mengatur mengenai bagaimana perencanaan, pengawasan, pengorganisasian maupun mengevaluasi suatu masalah.
2. Aturan dan Prosedur
Salah satu faktor yang mempengaruhi koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg ini adalah aturan dan prosedur. Pelaksanaan koordinasi yang melibatkan beberapa instansi mengakibatkan perlu adanya pedoman dan aturan sebagai petunjuk dalam mekanisme pekerja. Dimana instansi tersebut mempunyai tugas-tugas yang lain yang harus dikerjakan juga sehingga menyebabkan koordinasi

yang dilakukan tidak berjalan dengan baik atau *double* pekerjaan.

3. Rencana dan Tujuan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi jalannya koordinasi adalah rencana dan tujuan. Rencana dan tujuan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg ini harus jelas. Rencana yang dibuat secara jelas akan mempermudah pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pendistribusian gas ini sehingga mencapai tujuan yang jelas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

SIMPULAN

Hasil penelitian berupa observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Koordinasi dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru sudah terlaksana namun masih memiliki kendala.

Pembagian tugas dalam koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg sudah dilakukan namun menemui beberapa kendala karena pihak yang terkait dalam proses koordinasi ini membuat pembagian tugas hanya berdasarkan tupoksi masing tanpa ada kesepakatan bersama sebelumnya.

Disiplin dalam pendistribusian gas LPG 3 kg ini sudah cukup baik dilakukan oleh masing-masing pihak terkait karena tuntutan pekerjaan dan sanksi yang diberikan oleh setiap instansi yang bersangkutan. Namun dengan adanya dua lembaga yang sangat berpengaruh dalam pendistribusian gas LPG ini baik pihak pemerintah kota dan Pertamina sendiri, sehingga pihak lain, seperti Kepolisian masih belum berfungsi secara maksimal akibat sanksi yang belum mencakup pidana.

Pada indikator komunikasi belum berjalan dengan maksimal. Dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang

dilakukan pihak terkait pendistribusian gas LPG 3 kg. Perbedaan tugas membuat komunikasi berkurang sehingga jalannya koordinasi pun tidak begitu efektif dalam menyampaikan informasi, memecahkan masalah, serta evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Penyampaian informasi hanya bersifat lisan namun pada pertemuan-pertemuan atau diskusi masih sangat kurang dilakukan hanya sebatas pertemuan jika ada masalah yang berat. Dalam pendistribusian gas LPG 3kg, semua informasi lebih banyak disampaikan secara lisan dan kurangnya frekuensi pertemuan-pertemuan rutin sehingga kesatuan tindakan dalam menjalankan pelaksanaan pendistribusian tidak ada karena setiap anggota berpedoman sesuai dengan tugas masing-masing tanpa ada penyatuan terhadap tugas-tugas dari pihak lain dan ketika pengawasan pendistribusian dilaksanakan dan ditemukan masalah maka hanya sebatas lisan tanpa adanya pertemuan untuk memberikan sanksi dan memecahkan masalahnya.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi PT Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru serta pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Koordinasi dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya komunikasi yang baik secara formal maupun informal tidak hanya berupa secara tulisan namun komunikasi secara lisan melalui pertemuan ataupun rapat sangat penting dalam suatu koordinasi sehingga setiap anggota mendapatkan informasi yang jelas dan pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 kg bisa dilakukan dengan tepat sasaran.
2. Perlu adanya sinergitas dan hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota dengan

Pertamina. Karena dua pihak ini memiliki peran penting dalam pendistribusian gas LPG 3 kg. Meskipun peran Pertamina hanya sebatas penyaluran gas dan pendistribusiannya. Untuk itu pembahasan masalah dalam pendistribusian gas ini harus dikomunikasikan secara insentif dalam memecah masalahnya.

3. Adanya penetapan rencana dan tujuan yang disepakati bersama sehingga prosedur dan pedoman menjadi jelas dengan begitu dalam pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3kg dapat terkordinir baik koordinator dilapangan maupun pertanggung jawabannya.
4. Sosialisasi dan pemberian sanksi yang tegas bagi agen dan pangkalan yang melanggar ketentuan penjualan gas LPG 3kg sehingga masyarakat bisa membeli gas LPG sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pendistribusian gas LPG 3 kg ini bisa lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Budiyono. Amirullah Haris. 2004 . *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handayani, S. 2001, *Pengantar Suatu Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Gunung Agung: Jakarta.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Koontz Harold dan O' Donnell Cyriil. 1998. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Bhatara: Jakarta.

Manullang. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Ghalia Indonesia.

Martoyo, S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.

Nugroho, Riant. Dr. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.

Rivai. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siagian, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Terry, George R dan Leslie W. Rue. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Akasara.

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Public (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta; PT. Buku Seru.